KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU Sisdiknas, perhatikan PAUD dan nonformat
Tanggal : Senin, 24 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Revisi UU Sisdiknas

Perhatikan PAUD Dan Nonformal

ANGGOTA Komisi X DPR Karmila Sari mengingatkan, pendidikan di tahap paling awal harus jadi fondasi utama. Karenanya, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pengakuan penuh terhadap pendidikan nonformal menjadi fokus revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Menurut Karmila, proses pembelajaran di tahap awal akan mempengaruhi jenjang selanjutnya, yakni sekolah dasar hingga menengah agar bisa berjalan lebih efektif. Fondasi yang kuat di fase awal membuat anak lebih siap menerima materi yang lebih kompleks di tahap berikutnya.

"Tapi tiap ada penyampaian dari PAUD pasti mereka sedih. Kita harus maklum, karena dari titik awal saja pendidikan anak usia dini belum mendapatkan perhatian layak," ujar Karmila dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).

Menurutnya, lemahnya dukungan terhadap PAUD bisa berdampak panjang terhadap kualitas pembelajaran di tingkat SD, SMP, hingga SMA. Karakter dan kesiapan belajar anak Indonesia, lanjutnya, sangat bergantung pada kualitas layanan PAUD, sehingga penguatan sektor ini harus menjadi prioritas negara.

"Kalau dari awal kita tidak mendidik dengan baik anak usia dini, maka nanti mulai SD, SMP, sampai SMA akan terlihat dampaknya. Karakter-karakter anak berubah karena fondasinya tidak kuat," tegasnya.

Selanjutnya, lembaga pendidikan nonformal dapat pengakuan setara. Menurutnya, selama ini banyak lembaga nonformal, termasuk PAUD swasta, kelompok bermain, dan lembaga pendidikan masyarakat belum memperoleh dukungan dan legalitas memadai, sehingga sulit berkembang.

"Inilah yang menjadi tugas kami, bagaimana yang nonformal ini diakui. Tanpa pengakuan, tidak ada standar, tidak ada dukungan, dan tidak ada keberlanjutan," katanya. Komisi X DPR mendorong penguatan regulatif untuk memastikan lembaga nonformal dapat memperoleh legal standing, bantuan, dan standar kualitas yang jelas. Baginya, upaya ini termasuk peningkatan kapasitas pendidik nonformal melalui pelatihan dan sertifikasi.

Dia mengungkapkan, Pemerintah mempersiapkan sekitar 150 ribu kuota program sertifikasi S1 bagi guru dan tenaga PAUD melalui Ditjen Dikdasmen. Program itu diharapkan menopang peningkatan kompetensi sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik PAUD, yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap peningkatan kualifikasi akademik.

"Ini yang sedang diprioritaskan Dikdasmen supaya sertifikasi dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Karena tanpa peningkatan kualitas tenaga pendidik, PAUD tidak mungkin bisa berkembang," ujarnya.

Karmila menegaskan, seluruh proses revisi Sisdiknas harus memastikan keberpihakan terhadap pendidikan usia dini dan nonformal. Dari 15 klaster perubahan dalam rancangan undang-undang tersebut, isu PAUD disebutnya menjadi salah satu yang paling mendasar dan paling sering disuarakan oleh para pemangku kepentingan di berbagai daerah.■ PYB